



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 12
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / ke - 2
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 28 Maret 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H.Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) Tahun 2019.
Hadir	: orang dari 5 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas “**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) Tahun 2019**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai besaran RKAT-P BPKH tahun 2019 sebesar Rp286.462.519.444 (*dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) atau sebesar 5% dari nilai manfaat tahun 2018, untuk mendukung peningkatan kinerja BPKH yang dialokasikan untuk:

No.	Bidang	Nilai (Rp.)
2. K		
1	Hukum dan Kepatuhan	13.717.117.000
2	Pengembangan dan Kemaslahatan	7.382.715.000
3	Keuangan	3.470.000.000
4	Investasi	30.096.417.000
5	SDM dan Pengadaan	181.904.795.000
6	Operasional	20.803.679.000
7	Perencanaan dan Manajemen Risiko	5.783.190.340
8	Internal Audit	1.756.097.760
9	Kesekretariatan	21.548.508.344
Total		286.462.519.444

DPR RI menyetujui alokasi sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai manfaat BPKH tahun 2018 dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai manfaat BPKH tahun 2019 untuk didistribusikan kepada jemaah tunggu melalui rekening virtual.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan pembahasan dan persetujuan atas detail RKAT-P BPKH Tahun 2019 yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Komisi VIII DPR RI.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH untuk:

- a. Menyelesaikan kajian mengenai sustainabilitas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- b. Mempercepat penyelesaian sistem teknologi informasi rekening virtual untuk meningkatkan pelayanan terhadap calon jemaah haji.
- c. Meningkatkan kinerja di bidang investasi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan BPIH.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.